

**TESIS**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA  
PENJARA TERHADAP WALI NAGARI YANG MELAKUKAN TINDAK  
PIDANA KORUPSI**

**(Studi Putusan Nomor : 26/Pid. Sus-TPK/2015/PN.Pdg)**

**OLEH :**

**YOKI EKA RISE**  
**1820112009**

**Pembimbing Tesis :**

- 1. Prof. Dr. Elwi Danil, S.H., M.H.**
- 2. Dr. Fadillah Sabri, S.H., M.H**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2021**

## LEMBAR PENGESAHAN TESIS

**Judul** : **Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Penjara Terhadap Wali Nagari Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor : 26/Pid. Sus-TPK/2015/PN.Pdg)**  
**Nama** : **YOKI EKA RISE**  
**Nomor Induk Mahasiswa** : **1820112009**  
**Program studi** : **Magister Ilmu Hukum**

Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Akhir Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas dan dinyatakan lulus pada tanggal Juni 2021.

Menyetujui  
Komisi Pembimbing :

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Elwi Danil, S.H., M.H.  
NIP. 19600625 198603 1 003

Dr. Fadillah Sabri, S.H., M.H  
NIP. 19590111 198603 1 001

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Andalas

Kordinator Program Studi  
Magister Ilmu Hukum

Dr. Busyra Azheri, S.H. M.H  
NIP.196911181994031002

Dr. Khairani, S.H., M.H  
NIP. 196212111989012001

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Yoki Eka Rise  
NIM : 1820112009  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Tempat/Tanggal Lahir : Solok / 01 Januari 1986

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis dengan judul **“Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Penjara Terhadap Wali Nagari Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor : 26/Pid. Sus-TPK/2015/PN.Pdg)”** adalah merupakan hasil karya saya sendiri dan di dalam tesis ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi/ Lembaga Pendidikan manapun. Pengambilan karya orang lain dalam tesis ini dilakukan dengan menyebut sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Padang, Juni 2021  
Yang menyatakan

**YOKI EKA RISE**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA  
PENJARA TERHADAP WALI NAGARI YANG MELAKUKAN TINDAK  
PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor : 26/Pid. Sus-TPK/2015/PN.Pdg)**  
(Yoki Eka Rise, 1820112009, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas,  
179 halaman, 2021)

**ABSTRAK**

Negara Indonesia sebagai Negara hukum memiliki beberapa organ hukum untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang adil berdasarkan hukum yang salah satunya adalah hakim. Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana harus berdasarkan pertimbangan yuridis dan non yuridis. Permasalahan dalam tesis ini adalah 1. Bagaimana pembuktian yang dilakukan oleh Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Solok di Alahan Panjang dalam perkara Korupsi Wali Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok? 2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap Wali Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Unsur Melawan hukum sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti dengan fakta perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh terdakwa, diantaranya : tidak membayarkan Tunjangan Badan Musyawarah Nagari (BMN) Aie Dingin sejak bulan Mei sampai dengan Desember 2013, tidak merealisasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nagari Pola Padat Karya Tahun 2011, dan tidak dapat memepertanggungjawabkan keuangan nagari yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat untuk kegiatan Nagari Aie Dingin sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2011. 2. Hakim berpendapat bahwa apa yang dimaksud dengan unsur “Melawan Hukum” sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum tidak meliputi atas diri terdakwa dimana terdakwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 dan berdasarkan Peraturan Bupati Solok Nomor 14 tahun 2011 adalah karena jabatan terdakwa selaku Wali Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok yaitu hak dan kekuasaan yang dipunyai oleh seseorang untuk melakukan sesuatu sebagaimana dimaksud dengan unsur “Penyalahgunaan Wewenang” dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum. Untuk perbaikan kedepannya diperlukan 1. Upaya yang luar biasa dari seluruh aparat penegak hukum terutama bagi penuntut umum dan hakim dalam hal penuntutan dan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana korupsi tersebut dengan tetap mengedepankan pertimbangan-pertimbangan yuridis berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan 2. Agar para wali nagari bisa menjaga amanah jabatannya dengan tidak melakukan perbuatan korupsi dan mampu untuk mengelola keuangan nagari dengan sebaik-baiknya demi terwujudnya negara Indonesia yang adil dan makmur..

**Kata Kunci : Pertimbangan Hukum Hakim, Pidana Penjara, Wali Nagari, Tindak Pidana Korupsi.**

**JUDGE CONSIDERATIONS IN IMPOSING PRISON CRIMINAL AGAINST  
WALI NAGARI DID CORRUPTION (Study of Decision Number : 26/Pid. Sus-  
TPK/2015/PN.Pdg)**

(Yoki Eka Rise, 1820112009, Postgraduate Faculty of Law, Andalas University,  
179 pages, 2021)

**ABSTRACT**

The state of Indonesia as a state of law has several legal organs to realize a just social life based on law, one of which is a judge. Judges in making criminal decisions must be based on juridical and non-juridical considerations. The problem in this thesis is 1. How was the evidence carried out by the Public Prosecutor at the Solok District Attorney's Branch in Alahan Panjang in the Corruption Case of Wali Nagari of Aie Dingin, Lembah Gumanti District, Solok Regency? 2. What is the judge's consideration in imposing a prison sentence on Wali Nagari of Aie Dingin, Lembah Gumanti District, Solok Regency, who committed the crime of corruption? This research is a normative juridical research. The nature of this research is descriptive by using primary and secondary data. The results of the study show that: 1. The elements of being against the law as stated in the Primary Indictment of the Public Prosecutor have been proven by the facts of unlawful acts that have been committed by the defendant, including: not paying the Aie Dingin Consultative Body of Nagari (CBN) Allowance from May to December 2013, did not realize the Special Allocation Fund (SAF) Nagari Labor Intensive Pattern in 2011, and cannot be held accountable for nagari finances originating from non-binding third party donations for Nagari Aie Cold activities from 2008 to 2011. 2. The judge is of the opinion that what is meant by an unlawful element as referred to by the Public Prosecutor's Primary Indictment does not include the defendant, where the defendant in carrying out his duties and responsibilities based on Regional Regulation Number 7 of 2006 and based on the Regulation of the Regent of Solok Number 14 of 2011 is due to the position of the defendant. As Wali Nagari of Aie Dingin, Lembah Gumanti District, Solok Regency, namely the rights and powers possessed by a person to do something as referred to by the element of "abuse of authority" in the Subsidiary Indictment of the Public Prosecutor. For future improvements, it is necessary 1. The extraordinary efforts of all law enforcement officers, especially for public prosecutors and judges in terms of prosecuting and punishing the perpetrators of the criminal act of corruption while still prioritizing juridical considerations based on laws and regulations, and 2. So that the nagari guardians can maintain the mandate of his position by not committing acts of corruption and being able to manage the village finances as well as possible for the realization of a just and prosperous Indonesian state.

**Keywords: Judge's Legal Considerations, Prison Crime, Guardian Of The Village, Corruption Crime.**